

## STRATEGI PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH WIRING TAPPARENG KELURAHAN TEDDAOPU, KECAMATAN TEMPE, KABUPATEN WAJO

**Andi Asmulyani**

Teknik Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar  
ayumi\_el@gmail.com

### ABSTRAK

*Permukiman Wiring Tappareng merupakan salah satu kawasan permukiman yang terletak di Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Berdasarkan S.K Bupati Wajo Nomor 588 Tahun 2020 Permukiman Wiring Tappareng memiliki luas 4,23 Ha yang terdiri dari RT 001/RW 002 dan RT 002/RW 002 dengan tingkat kekumuhan sedang. Faktor-faktor yang berpengaruh di Permukiman Wiring Tappareng yaitu pada faktor sarana dan prasarana yang meliputi kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kekumuhan dan strategi penataan permukiman kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Untuk mengetahui tingkat kekumuhan, digunakan analisis pembobotan (skoring) berdasarkan 7 indikator dari sarana dan prasarananya. Sedangkan untuk strategi penataan permukiman kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yaitu menggunakan AHP (Analytical Hierarchy Process). Sehingga hasil dari penelitian ini tingkat kekumuhan termasuk dalam kategori ringan dan strategi penataan pada permukiman wiring tappareng untuk rencana bangunan gedung yaitu peremajaan (revitalisasi) berupa perbaikan dan penambahan komponen bangunan, rencana jalan lingkungan yaitu pemugaran (rehabilitasi) berupa peningkatan kapasitas jalan, rencana drainase lingkungan yaitu peremajaan (revitalisasi) dengan pembuatan tanggul di sepanjang aliran Sungai Walanae, rencana penyediaan air minum yaitu peremajaan (revitalisasi) berupa pembuatan reservoir, rencana pengelolaan air limbah yaitu pemugaran (rehabilitasi) dengan pembuatan saluran pembuangan air limbah rumah tangga, rencana pengelolaan persampahan yaitu peremajaan (revitalisasi) berupa pembuatan TPS di setiap ruas jalan dan untuk rencana proteksi kebakaran yaitu peremajaan (revitalisasi) berupa penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.*

**Kata Kunci** : Permukiman Kumuh, Tingkat Kekumuhan, AHP, Strategi Penataan

### A. PENDAHULUAN

Dinamika Penduduk di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang begitu pesat dari tahun ke tahun, hingga menyebabkan peningkatan kebutuhan akan ruang hidup itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan hasil rilis data Direktorat Jenderal Dukcapil tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah 273.879.750 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk dapat memberikan dampak terhadap penataan ruang hidup masyarakat.

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi terutama di daerah perkotaan akan berakibat pada semakin meningkatnya kepadatan penduduk terutama di kota-kota besar yang menyebabkan peningkatan pada kegiatan pembangunan, hal ini akan menjadikan terlampauinya kapasitas lahan untuk permukiman. Akibatnya lahan-lahan yang sempit sekalipun, yang seharusnya tidak layak diperuntukan untuk lahan permukiman telah ditempati pula oleh bangunan rumah mukim yang ukurannya

kecil, tata letaknya tidak teratur dan kualitas bangunannya sangat sederhana dan tidak layak huni.

Keberadaan permukiman kumuh dari tahun ke tahun didaerah perkotaan mengalami peningkatan yang cukup berarti. Secara fisik daerah kumuh ditandai oleh bentuk rumah kecil dengan kondisi lingkungan yang buruk, pola settlement yang tidak teratur serta kualitas lingkungan yang rendah, juga minimnya fasilitas umum. Dari fenomena kependudukan, daerah kumuh juga ditandai dengan rendahnya kualitas kehidupan, tingginya angka kepadatan.

Pemenuhan kebutuhan akan ruang hidup menjadi hal yang sangat penting serta penanganan kualitas permukiman yang layak menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan tempat hidup yang bebas dari kekumuhan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah/5:32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ  
فِي الْأَرْضِ لُمُتْرِفُونَ ۝ ٣٢

Terjemahnya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi” (Kementerian Agama RI, 2019)

Tafsir Q.S. Al-Maidah/5:32, menurut Kementerian Agama RI (2019) menyatakan bahwa:

Maksudnya, membunuh seorang manusia sama dengan menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Sebaliknya, menjaga kehormatan seorang manusia sama dengan menjaga kehormatan seluruh manusia.

Ayat ini menjelaskan bahwa keselamatan merupakan hal yang bersifat urgent dengan memberikan ruang hidup yang layak bagi masyarakat untuk menciptakan peradaban manusia yang lebih baik. Permukiman berdasarkan ajaran Islam adalah Darussalam. Dar berarti rumah, perkampungan, wilayah, daerah, kawasan, atau Negara. Salam berarti keselamatan, kesejahteraan, dan as-salam berarti keselamatan, kesejahteraan dalam Islam. Jadi Darussalam adalah perkampungan atau permukiman yang menimbulkan kesejahteraan dan keselamatan.

Kecamatan Tempe merupakan kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk 66.143 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2022, serta memiliki tingkat kepadatan penduduk 1.728 jiwa/Km<sup>2</sup>. Selain itu, wilayah kecamatan ini memiliki 42 titik

lokasi kawasan permukiman kumuh dengan luas total 209.795 Ha berdasarkan S.K Bupati Wajo No. 588 Tahun 2020. Titik lokasi kawasan kumuh ini umumnya permukiman tersebut terletak di sekitar tepian air Sungai Walanae dan Danau Tempe.

Salah satu titik lokasi permukiman kumuh Wiring Tappareng yaitu terletak di Kelurahan Teddaopu yang berada di tepian Sungai Walanae. Berdasarkan S.K Bupati Wajo No. 588 Tahun 2020, kelurahan ini memiliki kawasan kumuh seluas 4.23 Ha dengan tingkat kepadatan penduduk yaitu 170 jiwa/Ha. Wilayah ini memiliki tingkat kekumuhan yang cukup tinggi. sehingga dibutuhkan penataan kawasan permukiman agar dapat menciptakan lingkungan hidup yang layak bagi masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengurangi berbagai permasalahan yang ada di kawasan tersebut yang mendorong munculnya kawasan yang tidak tertata yang disebabkan oleh terbatasnya lahan permukiman sehingga tepian Sungai Welannae menjadi lahan permukiman. Dimana kondisi ini permukiman menjadi kumuh, maka dibutuhkan strategi penataan permukiman kumuh yang baik di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nantinya dan merasa nyaman tinggal di permukimannya, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Strategi Penataan Permukiman Wiring Tappareng di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana tingkat kekumuhan permukiman Wiring Tappareng di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana strategi penataan permukiman kumuh Wiring Tappareng di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui tingkat kekumuhan permukiman Wiring Tappareng di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi penataan permukiman kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

## **D. TINJAUAN PUSTAKA**

1. Perumahan dan Permukiman
  - a. Pengertian Perumahan  
Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Dalam SNI 03-6981-2004 perumahan didefinisikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
  - b. Pengertian Permukiman  
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

c. Elemen Perumahan dan Permukiman

Menurut Fajari (2014) permukiman terdiri dari:

- Alam yang meliputi: topografi, geologi, tanah, air, tumbuh- tumbuhan, hewan, dan iklim.
- Manusia yang meliputi: kebutuhan biologi (ruang, udara, temperatur, dsb), perasaan dan persepsi, kebutuhan emosional, dan nilai moral.
- Masyarakat yang meliputi: kepadatan dan komposisi penduduk, kelompok sosial, kebudayaan, pengembangan ekonomi, pendidikan, hukum dan administrasi
- Fisik bangunan yang meliputi: rumah, pelayanan masyarakat (sekolah, rumah sakit, dsb), fasilitas rekreasi, pusat perbelanjaan dan pemerintahan, industri, kesehatan, hukum dan administrasi
- Jaringan (network) yang meliputi: sistem jaringan air bersih, sistem jaringan listrik, sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem manajemen kepemilikan, drainase dan air kotor, dan tata letak fisik.

2. Permukiman Kumuh

a. Pengertian Permukiman Kumuh

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Adapun definisi permukiman kumuh dari para ahli berdasarkan sudut pandang dalam menilai dan mendefinisikan permukiman kumuh yaitu:

- 1) Judohusodo (2019) mendefinisikan permukiman kumuh dari fenomena kependudukan yakni permukiman kumuh merupakan permukiman yang ditandai dengan rendahnya kualitas hidup seperti tingginya angka kepadatan penduduk yaitu berkisar 350-1.250 jiwa per hektare dengan ukuran luas kampung mulai 15-20 hektar are. Dari seluruh bangunan rumah yang ada di permukiman kumuh, 60-70% ditempati oleh pemilik dan 30-40% disewakan yang sistem sewanya dalam satu kamar dihuni oleh beberapa orang atau satu keluarga.
- 2) Muta'ali dan Nugroho (2019), berdasarkan hasil observasi lapangannya menyebutkan bahwa ciri-ciri Kawasan permukiman kumuh yang menonjol dan perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
  - Rumah beratapkan jerami,
  - Rumah tanpa jendela/ventilasi udara, dan sinar matahari tidak dapat masuk,
  - Tidak terdapat pembagian ruang/kamar sesuai dengan peruntukannya,
  - Dinding dan lantai telah lapuk

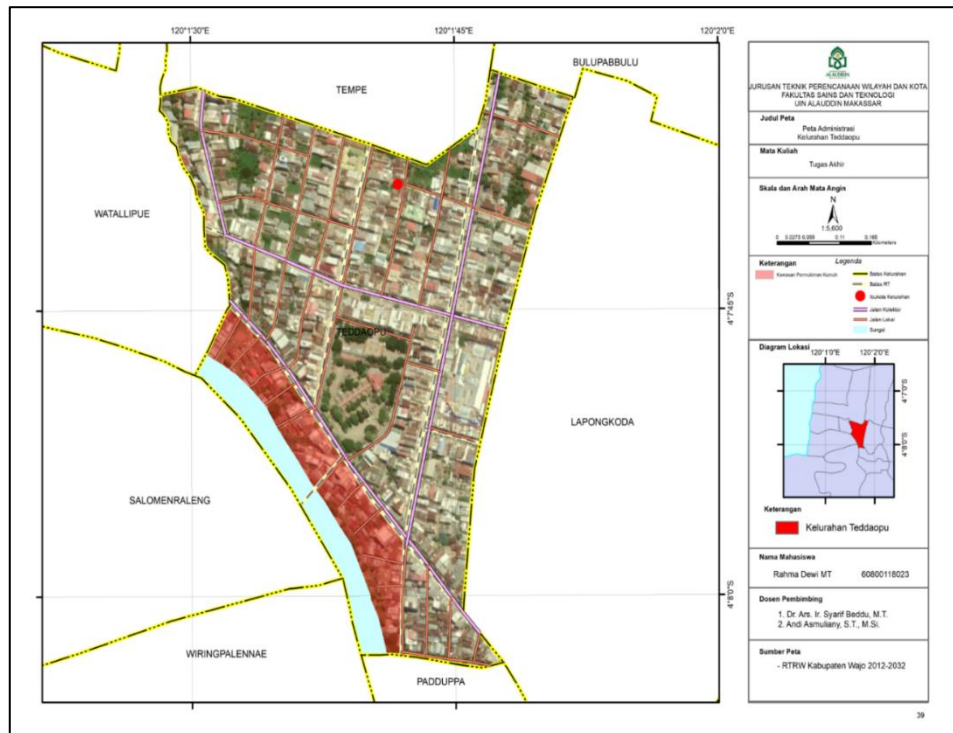
- Banyak dihuni oleh anggota rumah tangga tidak produktif,
  - Kepala rumah tangga bekerja pada jenis pekerjaan berpenghasilan rendah,
  - Tidak memiliki jamban, dan
  - Berada pada lingkungan permukiman dengan sanitasi jelek.
- 3) Ciri-ciri permukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Parsudi Suparlan dalam Budy dan Fredy (2016) adalah:
- Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
  - Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
  - Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
  - Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan- satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas.
  - Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
- 4) Yeh & Turner (2019) ciri-ciri nonfisik permukiman kumuh ditandai dengan jenis pekerjaan penghuninya yang sebagian besar bekerja di sektor informal dengan tingkat penghasilan yang rendah, dan jumlah anggota keluarga yang relatif banyak. Permukiman kumuh juga disinyalir terkait dengan lamanya tinggal di permukaan serta Pendidikan penghuninya yang rendah.

## **E. METODOLOGI PENELITIAN**

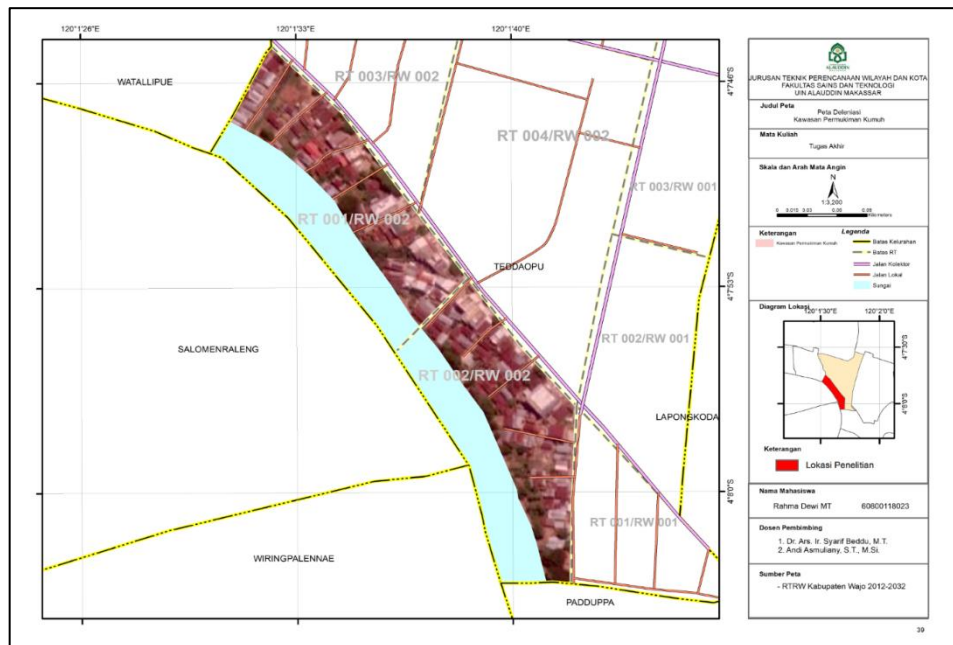
### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Kelurahan Teddaopu merupakan salah satu kelurahan dari 44 wilayah yang berstatus kumuh. di Kabupaten Wajo. Kelurahan ini memiliki 2 (dua) Rukun Warga (RW) yang merupakan Kawasan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng yaitu RT 001/RW 002 dan RT 002/RW 002 dengan luas 4,23 Ha, berdasarkan keputusan Bupati No: 588 Tahun 2020 lokasi permukiman Wiring Tappareng berada di bantaran Sungai Walanae sehingga Kawasan Wiring Tappareng rawan akan bencana banjir dengan keadaan permukiman yang masuk dalam kategori kumuh sedang.

**Andi Asmulyani, Strategi Penataan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**



**Gambar 1. Peta Administrasi Kelurahan Teddaopu**



**Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian**

**F. POPULASI DAN SAMPEL**

**1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini

yaitu seluruh masyarakat yang bermukim di Wiring Tappareng RW 02 Kelurahan Teddaopu yang berjumlah 383 jiwa.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai objek dalam suatu penelitian. Menurut (Hendryadi, 2014) sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Dengan kata lain, sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Pada analisis tingkat kekumuhan digunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel, adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot D^2 + 1} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N: Jumlah populasi (383 jiwa)

D2 : Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%)

Dari rumus tersebut perhitungan sampel yang diambil dengan tingkat kepercayaan 90% dengan tingkat kesalahan 10% adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{383}{383(0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{383}{3,83 + 1}$$

$$n = 79$$

Jadi, sampel untuk penelitian ini yaitu 79 jiwa.

Menurut Maklufah (2013) jumlah responden >100, maka pengambilan sampel 10%-15% atau 20%-25%. Maka pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 21% dari jumlah populasi untuk memperoleh jumlah sampel sebanyak 79 jiwa, sehingga proporsi sampel tiap kelas adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Data Kelas dan Jumlah Sampel

No	Lingkup Administrasi (RT)	Jumlah (jiwa)	Proporsi (21%)	Jumlah sampel (jiwa)
1.	RT 001	223	183 x 0,21	46
2.	RT 002	160	176 x 0,21	33
Total		383		79

Berdasarkan Tabel diatas, dengan menggunakan persentase proporsi 21% maka diperoleh jumlah sampel untuk penduduk di RT 001 sebanyak 46 jiwa, sedangkan untuk jumlah sampel penduduk RT 002 yaitu sebanyak 79 jiwa.

## G. VARIABEL DAN INDIKATOR

Menurut Arikunto (2010), variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik perhatian suatu penelitian. Bertolak dari pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut dan sifat atau nilai orang, faktor, perlakuan terhadap objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

**Tabel 2.** Kebutuhan Data Identifikasi Karakteristik Lokasi dan Penghuni Permukiman Kumuh

Variabel	Indikator
Lokasi	1. Frekuensi Bencana Banjir 2. Frekuensi Bencana Kebakaran
Kependudukan	1. Kepadatan penduduk 2. Pertumbuhan Penduduk 3. Mata pencaharian
Ekonomi	1. Tingkat Pendapatan 2. Jenis Pekerjaan
Sosial	1. Tingkat Pendidikan 2. Lama Tinggal

Sumber : Hasil Analisa 2022

**Tabel 3.** Kebutuhan Data Identifikasi Karakteristik Sarana dan Prasarana Permukiman

Aspek	Kriteria	Data Numerik
Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidak-teraturan bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur
	b. Tingkat kepadatan bangunan	Luas kawasan sesuai dengan persyaratan
	c. Ketidak-sesuaian dengan persyaratan teknis	Jumlah bangunan tidak sesuai persyaratan teknis
Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan	Panjang jalan ideal-Panjang jalan eksisting
	b. Kualitas permukaan jalan lingkungan	Panjang Jalan Rusak
Kondisi Penyediaan air minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Jumlah KK tidak terakses air minum aman
	b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	Jumlah KK tidak terakses air minum cukup
Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidak-mampuan mengalirkan limpasan air	Luas kawasan yang terkena genangan
	b. Ketidak-tersediaan drainase	Panjang drainase ideal-Panjang drainase eksisting
	c. Ketidak-terhubungan dengan sistem drainase perkotaan	Panjang drainase penghubung
	d. Tidak terpeliharanya drainase	Panjang sistem drainase tidak terpelihara



Aspek	Kriteria	Data Numerik
	e. Kualitas konstruksi drainase	Panjang drainase yang buruk
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak sesuai standar teknis	Jumlah KK dengan sistem air limbah tidak sesuai standar teknis
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah KK dengan sapras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah KK dengan prasarana dan sarana pengolahan sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
	b. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis
	c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah KK dengan prasarana dan sarana pengolahan sampah tidak terpelihara
Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidak-tersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran
	b. Ketidak-tersediaan sarana proteksi kebakaran	Jumlah KK tidak terakses air minum cukup

Sumber : Hasil Analisa 2022

## H. METODE ANALISIS

1. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana tingkat kekumuhan di permukiman Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu yaitu menggunakan analisis pembobotan (skoring). Pembobotan adalah penilaian terhadap setiap parameter yang dijadikan sebagai analisis pada kriteria permukiman kumuh untuk mengetahui tingkat kekumuhannya. Pembobotan dengan memberikan nilai pada tingkat kekumuhan dengan skala 71-95 untuk kumuh berat, 45-70 untuk kumuh sedang, 19-44 untuk kumuh ringan dan <19 untuk tidak kumuh. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan mengacu pada kriteria berikut parameter untuk tingkat kekumuhan yang digunakan:

**Tabel 4.** Tingkat Kekumuhan

Jumlah Nilai	Keterangan
71-95	Kumuh Berat
45-70	Kumuh Sedang
19-44	Kumuh Ringan
<19	Tidak Kumuh

Sumber: Permen PUPR No.14 Tahun 2018

**Andi Asmulyan, Strategi Penataan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng Kelurahan  
Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**

a. Analisis Tingkat Kekumuhan

**Tabel 5. Formulasi Penilaian**

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	KETERANGAN	NILAI	
<b>IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN</b>					
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	• 76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan yang tidak menghadap ke jalan memiliki aksesibilitas yang sulit karena bangunannya terhalang oleh bangunan lain .</li> <li>• Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan Sungai.</li> </ul>	5	
		• 51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan		3	
		• 25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan		1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	• 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk kota metropolitan dan kota besar &gt;250 unit/Ha</li> <li>• Untuk kota sedang dan kota kecil &gt;200 unit/Ha</li> </ul>	5	
		• 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan		3	
		• 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan		1	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian dampak lingkungan</li> <li>• Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum</li> <li>• Keselamatan bangunan</li> <li>• Kesehatan bangunan</li> <li>• Kenyamanan bangunan</li> <li>• Kemudahan bangunan</li> </ul>	5	
		• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis		3	
		• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis		1	
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	• 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	Keterhubungan antar persil dalam kawasan permukiman, keterhubungan jalan lingkungan ke jalan sekunder lainnya, agar akses jalan dapat selalu dilalui kendaraan	5
			• 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan		3
			• 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan		1
b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan		• 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk dimana kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.	5	
		• 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk		3	
		• 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk		1	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	• 76% - 100% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak	5	

**Andi Asmulyani, Strategi Penataan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng Kelurahan  
Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	KETERANGAN	NILAI	
<b>IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN</b>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman</li> </ul>	berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	3	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman</li> </ul>		1	
	b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya</li> </ul>	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman dapat mengakses air minum dan memenuhi kebutuhan air minum keluarga pertahunnya	5	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya</li> </ul>		3	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya</li> </ul>		1	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidak-mampuan Mengalirkan Air Limpasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area tidak mampu mengalirkan air limpasan</li> </ul>	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	5	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% area tidak tersedia area tidak mampu mengalirkan air limpasan</li> </ul>		3	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% area tidak mampu mengalirkan air limpasan</li> </ul>		1	
	b. Ketidak-tersediaan Drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area ketidak-tersediaan drainase</li> </ul>	Jumlah bangunan yang tidak memiliki drainase	5	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% area ketidak-tersediaan drainase</li> </ul>		3	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% area ketidak-tersediaan drainase</li> </ul>		1	
	c. Ketidak-terhubungan dengan Sistem Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	Jumlah bangunan yang tidak memiliki drainase yang terhubung dengan sistem pengelolaan perkotaan (drainase sekunder)	5	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>		3	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>		1	
		d. Tidak Terpeliharanya a Drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76%-100% area tidak terpeliharanya sistem drainase</li> </ul>	Panjang drainase yang tidak terpelihara dan telah mengalami kerusakan berupa rusaknya drainase atau terjadi penumpukan sampah atau material lainnya yang menyebabkan pendangkalan pada drainase.	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51%-75% area tidak terpeliharanya sistem drainase</li> </ul>		3
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25%-50% area tidak terpeliharanya sistem drainase</li> </ul>		1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76%-100% area dengan kualitas konstruksi drainase</li> </ul>	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa	5	

**Andi Asmulyani, Strategi Penataan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng Kelurahan  
Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	KETERANGAN	NILAI
<b>IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN</b>				
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51%-75% area dengan kualitas konstruksi drainase</li> <li>• 25%-50% area dengan kualitas konstruksi drainase</li> </ul>	material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	3 1
5. Kondisi pengelolaan air limbah	a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	• 76% - 100% populasi dengan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	5
		• 51% - 75% populasi dengan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis		3
		• 25% - 50% populasi dengan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis		1
	b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	• 76% - 100% Populasi dengan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik</li> <li>• Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat</li> </ul>	5
		• 51% - 75% Populasi dengan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis		3
		• 25% - 50% Populasi dengan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis		1
6. Kondisi pengelolaan persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	• 76% - 100% populasi dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga</li> <li>• Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan</li> <li>• Sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan;</li> <li>• Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.</li> </ul>	5
		• 51% - 75% populasi dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis		3
		• 25% - 50% populasi dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis		1
	b. Sistem pengelolaan persampahan tidak	• 76% - 100% populasi dengan sistem pengelolaan sampah tidak sesuai standar teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:	5

**Andi Asmulyan, Strategi Penataan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	KETERANGAN	NILAI
<b>IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN</b>				
	memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>51% - 75% populasi dengan sistem pengelolaan sampah tidak sesuai standar teknis</li> <li>25% - 50% populasi dengan sistem pengelolaan sampah tidak sesuai standar teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pewadahan dan pemilahan domestic</li> <li>Pengumpulan lingkungan</li> <li>Pengangkutan lingkungan</li> <li>Pengelolaan lingkungan</li> </ul>	3
				1
	c. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>76%-100% populasi dengan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak terpelihara</li> <li>51%-75% populasi dengan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak terpelihara</li> </ul>	Ketersediaan dan terpeliharanya tempat pembuangan sampah yang memudahkan masyarakat untuk membuang sampah.	5
				3
				1
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>76%-100% bangunan tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran</li> <li>51%-75% bangunan tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran</li> <li>25% - 50% bangunan memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar</li> </ul>	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasokan air</li> <li>Jalan lingkungan</li> <li>Sarana komunikasi</li> <li>Data sistem proteksi kebakaran lingkungan</li> </ul>	5
				3
				1
	b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>76% - 100% bangunan tidak memiliki sarana proteksi kebakaran</li> <li>51% - 75% bangunan tidak memiliki sarana proteksi kebakaran</li> <li>25% - 50% bangunan tidak memiliki sarana proteksi kebakaran</li> </ul>	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li> <li>Kendaraan pemadam kebakaran</li> <li>Mobil tangga sesuai kebutuhan.</li> </ul>	5
				3
				1

Sumber : Hasil Analisa 2022

b. Teknik Penilaian Kriteria Kekumuhan

**Tabel 6.** Teknik Penilaian Kriteria Kekumuhan

Indikator	Sub Indikator	Rumus yang digunakan
Kondisi bangunan gedung	Ketidakteraturan bangunan yaitu jumlah bangunan yang tidak memiliki keteraturan.	$\frac{\text{Jumlah bangunan tidak teratur (Unit)}}{\text{Jumlah Bangunan keseluruhan (Unit)}} \times 100\%$
	Tingkat kepadatan bangunan yaitu luas kawasan yang memiliki kepadatan tidak sesuai dengan ketentuan	$\frac{\text{Luas Wilayah (Ha)}}{\text{Luas Kawasan Kumuh (Unit)}} \times 100\%$
	Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis yaitu jumlah bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis.	$\frac{\text{Jumlah Bangunan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (Unit)}}{\text{Jumlah Bangunan Keseluruhan (Unit)}} \times 100\%$



















